

# MEMBANGUN GENERASI MUDA SMART AND GOOD CITIZENSHIP MELALUI PEMBELAJARAN PPKn MENGHADAPI TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Endang Ikhtiarti<sup>1</sup>, Rohman<sup>2</sup>, M. Mona adha<sup>3</sup>, Hermi Yanzi<sup>4</sup>  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

## ABSTRAK

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi muda yang saat ini sedang tumbuh. Generasi muda yang saat ini berusia 16-30 tahun banyak menyerap berbagai macam ilmu yang diperoleh dari mana saja termasuk internet, pendidikan formal, pendidikan informal, maupun teknologi informasi-komunikasi (TIK) yang semakin maju. Oleh karena itu agar suatu bangsa mempunyai karakter *smart and good citizenship* maka generasi muda perlu dibekali seperangkat pengetahuan dan pembelajaran sebagai warganegara muda yang cerdas dan juga baik salah satunya melalui pembelajaran PPKn. PPKn merupakan program pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berfikir, bertindak, besikap, berkembang, dan berinteraksi dengan cerdas, kritis, analitis, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab terhadap diri, lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dan berkehidupan dunia yang dijiwai nilai-nilai agama, budaya, hukum, keilmuan serta watak yang bersemangat, bergelora, dan mewujudkan sifat demokratis dalam negara hukum Indonesia yang religious, adil, beradab dan bersatu, bermasyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga fokus dan target utama dari pembelajaran PPKn adalah pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara demokratis, taat hukum dan taat asas dalam kehidupan masyarakat madani. Pemuda (saat ini) adalah pemimpin masa depan, oleh karena itu pendidikan karakter bagi generasi muda menjadi sangat penting dan harus terus menerus dilakukan oleh semua pihak demi harapan dan masa depan bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** generasi muda SMART, pembelajaran PPKn, revolusi teknologi 4.0.

# **BUILDING THE YOUNG SMART AND GOOD CITIZENSHIP GENERATION THROUGH PPKN LEARNING FACING THE CHALLENGE OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0**

**Endang Ikhtiarti<sup>1</sup>, Rohman<sup>2</sup>, M. Mona adha<sup>3</sup>, Hermi Yanzi<sup>4</sup>  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**

## **ABSTRACT**

The future of a nation is largely determined by the young generation that is currently growing. The young generation who are now 16-30 years old absorbs many kinds of knowledge obtained from anywhere including the internet, formal education, informal education, and increasingly advanced information-communication technology (ICT). Therefore, for a nation to have a smart and good citizenship character, the young generation needs to be equipped with a set of knowledge and learning as smart and good young citizens, one of them is through learning PPKn. PPKn is a learning program that aims to form citizens who think, act, act, develop, and interact with smart, critical, analytical, active and responsible participation in themselves, society, nation, and state and have a world of life that is imbued with values religious, cultural, legal, scientific and characteristic values that are passionate, vibrant, and embody the democratic nature of the Indonesian legal state that is religious, fair, civilized and united, socially just based on Pancasila and the 1945 Constitution. So that the main focus and targets of PPKn learning is debriefing knowledge, fostering behavioral attitudes, and training skills as democratic citizens, law-abiding and obedient in the life of civil society. Youth (currently) are the leaders of the future, therefore character education for the younger generation is very important and must be continuously carried out by all parties for the hopes and future of the Indonesian nation.

**Keywords: SMART young generation, PPKn learning, technology revolution 4.0.**

## **PENDAHULUAN**

Generasi muda adalah tulang punggung Bangsa dan Negara merupakan istilah yang sering kita dengar sehari-hari. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial saat ini memerlukan panutan dan contoh yang dapat membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi di era reformasi ini, generasi muda dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, generasi muda adalah tonggak keberlangsungan masa depan Indonesia. Budimansyah (2010: 2), menyatakan bahwa, penumbuhan terhadap generasi muda menjadi warga negara yang baik menjadi perhatian utama, tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggungjawab, efektif dan terdidik. Pendapat sangat factual dengan kondisi dan bangsa Indonesia saat ini. Generasi bangsa saat ini membutuhkan penumbuhan dalam sikap dan kepribadian guna menumbuhkan pribadi yang demokratis, bertanggungjawab, dan toleran dengan diimbangi sikap dan akhlak yang mulia. Hal tersebut jelas bahwa pendidikan dan penumbuhan generasi muda sangat penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan guna menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang. Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibuatkan kurikulum sebagai rancangan pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman dan rancangan pelaksanaan pendidikan yang dijadikan sebagai penuntun dan pegangan dalam pelaksanaan sistem pendidikan.

Dalam kurikulum 2013 telah mengarahkan semua mata pelajaran untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Penanaman sikap, kepribadian, dan tanggungjawab peserta didik telah diarahkan dalam setiap mata pelajaran dari semua jenjang pendidikan. Salah satu mata pelajaran yang sangat erat dengan aspek penanaman sikap dan kepribadian serta sikap tanggungjawab adalah mata pelajaran PPKn. Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dipersiapkan dalam menghadapi persaingan hidup di masyarakat dan umunya persaingan global. Hal tersebut senada dengan apa yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu sebagai berikut: 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran PPKn yang

menitikberatkan pada aspek penanaman sikap dan kepribadian peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, yakni baik kepada Tuhannya, baik kepada negaranya dan baik terhadap sesamanya dengan mampu menunjukkan salah satu sikap tanggungjawab sebagai warga negara (*civic responsibility*) dan memiliki keterampilan warga negara yang baik (*civic skill*) dalam bentuk keterampilan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (*participation skill*). Hal ini sesuai dengan pendapat Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 320), menyatakan bahwa tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah ...agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Participation skill*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun penilaian mata pelajaran PPKn, yang terdiri dari penilaian sikap sosial dan spiritual, penilaian pengetahuan, dan penilaian kinerja atau keterampilan, jenis-jenis penilaian tersebut akan mampu memicu terbentuknya kepribadian dan sikap peserta didik yang sesuai dengan tuntutan dan tujuan PPKn yakni menjadi warga Negara yang baik, yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, demokratis, dan tanggungjawab terutama bagi generasi muda.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Civics menurut Stanley E. Dimond & Elmer F. Pliger adalah studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warganegara.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dalam pengertian yang luas adalah tugas yang penting di dalam semua masyarakat masa ini. Pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Budimansyah (2012:180) bahwa:

Secara kurikuler, PPKN dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik mampu : (a) berfikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bemegara serta anti korupsi; (c) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;

dan (d) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada bagian lain Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Cogan (1998:13) adalah *Citizenship education has been described as 'the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen.* Dengan demikian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digambarkan sebagai 'kontribusi pendidikan untuk pengembangan kanaktenistik-karakteristik warganegara. Sedangkan menurut Ismaun (2006:126) bahwa untuk setiap jenjang pendidikan diperlukan PPKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui proses pemahaman dan penghayatan serta pelatihan keterampilan intelektual maupun operasional, sebagai bekal bagi peserta didik untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungannya, bangsa dan negaranya dalam pergaulan antar bangsa. Kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Sapriya (2003:2) bahwa:

Dengan paradigma yang direvitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki misi mengembangkan pendidikan demokrasi yang di dalamnya mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

Oleh karena itu dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dilaksanakan secara efektif agar dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan sehingga dapat memberikan kontribusi perubahan dalam masyarakat kearah yang lebih baik, apalagi menurut Djahin (1985 : 21) secara sosiologis bahwa anak didik tersebut hidup dalam dunia nyata kehidupan lingkungannya serta harus mampu hidup fungsional dan bermasyarakat (*sociatable*). Berkenaan dengan pembelaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang efektif menurut Winataputra (2007:40) adalah mengajar warga negara tentang bagaimana berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam masyarakat merupakan hal yang kritis bagi kelangsungan komitmen partisipasi warga negara lebih lanjut.Usia sekolah lanjutan merupakan saat yang krusial dalam pengembangan peran dan tanggung jawab warga negara. Pada usia inilah siswa menemukan identitas dirinya dan perannya dalam masyarakat sekitarnya dan masyarakat dalam arti keseluruhan. Pada bagian lain Allen (Winataputra,2001) melihat "*citizenship education*" lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan program pendidikan persekolahan, di mana mata pelajaran "*civics*" merupakan

unsur yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2012:4) bahwa *Citizenship or civic education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibility as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process*. Hal ini bermakna bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Selanjutnya dilihat secara keilmuan menurut Winataputra (2001) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn ) merupakan bidang pendidikan yang memiliki tiga domain, dengan domain yang pertama adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan persekolahan (*school civics*), kemudian dengan domain kedua yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civics*), dan pada domain ketiga adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akademik (*academic civics*). Ketiga domain tersebut secara substantif tidak bisa dipisahkan secara saling terisolasi, karena ketiganya terikat oleh satu komitmen tujuan, yakni mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik atau *smart and good citizen* dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Sedangkan menurut pendapat Jack Allen (Somantri, 2001:283) bahwa:

*Citizenship education, properly defined, as the product, of the entire program of the school, certainly not simply of the social studies program, and assuredly not merely of a course of civics. But civic has an important function to perform, it confronts the young adolescent for the first time in his school experience with a complete view of citizenship function as rights and responsibilities in democratic context'.*

Hal tersebut bermakna bahwa *Citizenship Education* sebagai hasil seluruh program sekolah, bukan merupakan program tunggal ilmu-ilmu sosial, dan bukan sekedar rangkaian pelajaran tentang kewarganegaraan. Tetapi kewarganegaraan mempunyai fungsi penting untuk melakukan, yaitu menghadapkan remaja, peserta didik pada pengalaman di sekolahnya tentang pandangan yang menyeluruh terhadap fungsi kewarganegaraan sebagai hak dan tanggung jawab dalam suasana yang demokratis.

## **Pembelajaran Pendidikan Kewargangaraan (PPKn )**

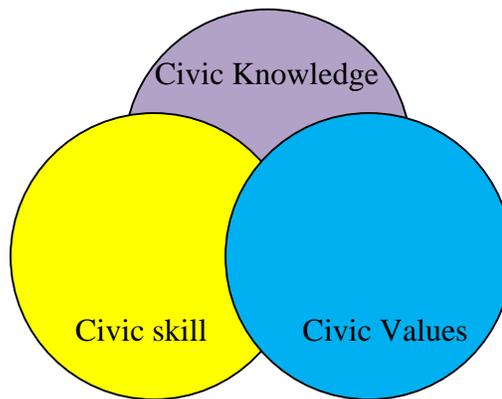
### **a. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan (NKRI), dalam arti luas pendidikan adalah upaya pengembangan potensi warganegara pada tiga aspek yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan kecakapan hidup. Upaya mengembangkan ketiga aspek tersebut, dapat dirancang secara sistematis melalui mata pelajaran tertentu. Khusus yang berkaitan dengan masalah nasionalisme, hukum, konstitusi, politik, hak asasi manusia, demokrasi dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran tersebut adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (*Civic Education*).

Komponen-komponen utama *Civic Education* yang bermutu diajukan oleh *Center for Civic Education* pada Tahun 1994 dalam *The National Standards for Civics and Government* yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), Kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak/karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Sejalan dengan hal tersebut, telah berkembang wacana tentang paradigma baru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa komponen pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara saling berkait satu sama lain.

### **b. Dimensi Materi PPKn**

Paradigma baru PPKn menerapkan pola pikir baru dengan hasil belajar yang dimiliki siswa, hal ini dijelaskan pada gambar berikut :



**Gambar 2. 1 Dimensi Materi PPKn**  
**Sumber : Depdiknas, (2003 : 2)**

Diagram di atas menggambarkan bahwa mata pelajaran PPKn terdiri dari tiga dimensi antara lain pengetahuan Kewarganegaraan (*civic Knowledge*) yang mencakup bidang Politik, hukum, dan moral. Dimensi ketrampilan Kewarganegaraan (*Civic skill*) meliputi ketrampilan, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi nilai-nilai Kewarganegaraan (*civic Values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul serta perlindungan terhadap minoritas.

Dijelaskan pula bahwa seorang warga negara perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang kewarganegaraan terlebih dahulu, terutama pengetahuan bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara perlu memiliki keterampilan secara intelektual dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, hasil belajar berupa pengetahuan dan keterampilan itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik, dengan memperlihatkan sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan, rasa kesetiakawanan.

Pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan politik, hukum, moral dan pengembangan kecakapan. Oleh karena itu mata pelajaran PPKn merupakan bidang kajian antar disiplin, menggunakan pendekatan isomeristik yang tercermin dari ruang lingkup materi pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi : Persatuan dan kesatuan, Norma hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warganegara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan politik, Pancasila, dan Globalisasi.

Komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Pembekalan materi akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang tentang hakekat kehidupan bermasyarakat .

## **KONTRIBUSI PPKN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA**

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang akan membawa perubahan pada tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap maupun berbuat (Gulo dalam Pebriyenni, 2002:23). Pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan perilaku yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah, 2003). Perubahan perilaku itu juga termasuk dari belajar tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn ) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPPKn ). Belajar PPKn pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Warga negara inilah yang disebut warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal itu berarti PPKn bersifat penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tercantum bahwa program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang

berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Namun, agar memperoleh input (mahasiswa) yang memadai bagi perguruan tinggi, perlu pula proses pembelajaran yang optimal pada tingkat pendidikan menengah atau sederajat. Untuk itu diperlukan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru/dosen adalah mengkoordinasikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa/mahasiswa. Secara umum, lingkungan sekolah yang baik dapat meningkatkan karakter siswa (Dupper, 2010:18; Wuryandani, Fathurrohan & Ambarwati, 2016:213). Karena itu, iklim sekolah yang positif perlu diciptakan dengan memperhatikan: (1) keadaan fisik sekolah yang menarik, (2) sekolah memiliki upaya untuk membangun dan memelihara hubungan yang peduli, saling menghormati, mendukung dan kolaborasi antara anggota staf sekolah, siswa dan keluarga, (3) siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, (4) siswa menganggap aturan sekolah sebagai hal yang jelas, adil dan tidak terlalu keras, (5) sekolah aman bagi siswa, keluarga dan guru, (6) tersedia layanan belajar, (7) sekolah memiliki tingkat akademik dan perilaku yang tinggi, dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan, (8) memiliki upaya untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional semua siswa, (9) guru sebagai model dalam memelihara sikap, dan (10) memandang orangtua dan anggota masyarakat sebagai sumber daya yang berharga dan mereka didorong untuk terlibat aktif di sekolah. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran (remedial dan pengayaan). Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian kegiatan guru/dosen dalam rangka membuat siswa/mahasiswa belajar yang meliputi: persiapan, merencanakan program pengajaran, penyusunan persiapan mengajar (*lesson plan*) dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga, alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Jones (2015:99) mengatakan, keberhasilan dalam pembelajaran sangat tergantung pada efektivitas perencanaan serta seberapa baik menempatkan rencana tersebut ke dalam tindakan.

Perencanaan dianggap sebagai kunci pembelajaran yang dapat membuat siswa belajar secara efektif, menarik, bervariasi dan progresif. Melalui perencanaan yang baik, guru dapat mengidentifikasi bagaimana siswa belajar dan membuat kemajuan (*The Qualification and Curriculum Authority, 2015:2*). Selanjutnya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dirancang. Pelaksanaan pembelajaran PPKn banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa/mahasiswa, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola. Strategi pembelajaran merupakan bagian dari proses perencanaan. Kavaliauskiene (2011) menjelaskan, strategi pembelajaran merupakan suatu sistem pengajaran yang mengandung prosedur sistematis sehingga guru dapat mengorganisir materi dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran. Kegiatan pasca pembelajaran dapat berbentuk enrichment (pengayaan), dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa/mahasiswa yang berkesulitan belajar. Ciri-ciri pembelajaran yang baik yaitu: merupakan upaya sadar dan disengaja, membuat siswa/mahasiswa belajar, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, pelaksanaan aktivitas belajar terkendali, baik isi, waktu, proses maupun hasilnya. Proses pembelajaran yang berkualitas dengan keluaran yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat merupakan faktor penting untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Kualitas tidak dapat hanya dari capaian nilai dan persentase keterlibatan siswa/mahasiswa dalam pembelajaran. Karena itu, kurikulum dan metode pembelajaran yang dikembangkan di perguruan tinggi perlu inovasi untuk mendorong perkembangan peserta didik untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang seimbang. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran PPKn harus mampu mencapai tujuan: (1) Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius. (2) Menjadi warga negara yang cerdas berkeadaban, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. (3) Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan cinta pada tanah air. (4) Mengembangkan sikap demokratis bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian,

kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu diketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan maka ia berstatus warga negara. Konsep warga negara (*citizen, citizen*) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) adalah “warga negara” yang dapat berarti warga, anggota (member) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.

Generasi muda Indonesia haruslah insan yang tidak hanya berkompeten dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tetapi juga generasi yang memiliki kekuatan iman dan takwa (IMTAK) serta berperilaku moral yang luhur. Ketika aspek-aspek tersebut terpenuhi maka akan muncul generasi masa depan yang peduli terhadap kemajuan Indonesia, mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Karakter dan nilai-nilai yang sudah menyerap kedalam diri dan diaplikasikan kedalam lingkungan masyarakat juga dapat berdampak pada perilaku yang tidak melanggar norma dan nilai agama, hukum, dan budaya. Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat saat ini telah membawa dampak bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah adanya *trend* kehidupan yang semakin dinamis, terutama dari segi penerapan nilai dan budaya. Kondisi ini memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam dan multi dimensional.

Berdampak menguntungkan apabila mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Namun juga dapat berdampak merugikan apabila terperdaya dengan pemanfaatan untuk kepentingan yang negatif, seperti misalnya yang berimplikasi secara langsung pada perubahan kehidupan dan karakter generasi muda. Terkait dengan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, muncul persoalan yang terkait dengan karakter para pemuda pada masa kini. Perilaku pemuda yang cenderung individualis dan kurang mendasarkan perilakunya pada nilai-nilai budaya bangsa menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Disadari atau tidak bahwa teknologi informasi juga turut menyebarkan pola budaya barat (*westernisasi*), yang ternyata dengan sangat mudah digandrungi oleh kebanyakan generasi muda. *Westernisasi* yang berwujud dalam berbagai macam bentuk *life style*, seni, dan pola pikir telah masuk melalui

berbagai macam cara, salah satunya adalah melalui media yang merupakan instrumen hasil perkembangan teknologi informasi.

Perubahan sikap atau perilaku generasi muda adalah hal serius yang perlu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Selain dari pada pendidik dan orangtua, media juga dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Tanggungjawab semua pihak adalah tidak hanya menjadikan generasi muda cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Hal ini berarti juga bahwa perlu ada fokus terhadap upaya pembangunan akhlak generasi muda. Bahwa keilmuan formal adalah penting, namun apa jadinya kalau ilmu yang dimiliki tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Proses pembangunan akhlak ini juga yang akan menjadi benteng dalam memantapkan nilai-nilai budaya bangsa dari dampak negatif budaya barat atau westernisasi.

## **PENUTUP**

Peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan Generasi Muda *Smart And Good Citizenship*, Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap warganegara yang diharapkan bangsa. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku dan kebiasaan warganegara khususnya pemuda. Oleh karena itu pentingnya pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membangun generasi muda *smart and good citizenship*. Pemuda adalah pemimpin masa depan, oleh karena itu untuk mempersiapkan generasi muda yang *smart and good citizenship* merupakan tanggungjawab kita bersama. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui proses pembelajaran terutama melalui pembelajaran PPKn, upaya ini bertujuan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 demi harapan dan masa depan bangsa Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Budimansyah, D dan Suryadi, K. (2010). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

Budimansyah, D. 2012. *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*. Bandung: Widya Aksara.

Dupper, D.R. 2010. *A New Model of School Discipline Engaging Students and Preventing Behavior Problems*. New York: Oxford University Press.

Gulo, W. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grasindo.

- Jones, Keith. 2004. *Planning for Mathematics Learning*. New York: Routledge.
- Kavaliauskiene, Galane. 2011. "Life Long Learning Strategis: Socialiniu Mokslu Studi.jos." *Societal Studie*, Vol 3(4), p. 1253-1267.
- Lickona, T. 1994. *Educating for Character*. New York: Routledge.
- Roziqin, Muhammad Zainur. 2007. *Moral Pendidikan di Era Global: Pergeseran Pola Interaksi GuruMurid di Era Global*. Malang: Averroes Press.
- Syah, Muhibbin. 2008. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja pers.
- Rosdakarya. The Qualification and Curriculum Authority. 2001. *Planning for Learning in the Fondation Stage*. London: QCA.
- Uliana, Pipit dan Naniek Setyawati. 2013. "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kultur Sekolah pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri I Gedang Sidoarjo." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1 (1) hlm 165-179.
- Winataputra, Udin S. 2014. "Memantapkan Paradigma Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan." *Prosiding AP3KnI, Prodi PPPKn FIS Universitas Manado*, ISBN 978-602-71575-0-7.
- Wuryandani, Wuri, Fathurrohan dan Unik Ambarwati. 2016. "Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian di Muhammadiyah Boarding School." *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 2 Juni 2016.